



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

TAHUN 2022

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU



Jl. Cut Nyak Dien
Pekanbaru



bkd.riau.go.id



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 28 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan serta penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022.**

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Agustus 2021

GUBERNUR RIAU,



SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,



MASRUL KASMY

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR 28

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Riau Tahun 2020 dan Capaian Renstra BKD Provinsi Riau	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan	20
2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	21
2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)	23
2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	23
2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan	

	program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan	24
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB	III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	31
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	31
	3.1.1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia	31
	3.1.2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia	32
	3.1.3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	33
	3.1.4. Komisi Aparatur Sipil Negara	35
	3.1.5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	36
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
	3.3. Program dan Kegiatan	38
BAB	IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	44
BAB	V : PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Provinsi Riau	8
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	16
Tabel 2.3 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Riau Tahun 2020	20
Tabel 2.4 Indeks Kepuasan Pelayanan BKD Provinsi Riau Tahun 2020	21
Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan dan Hambatan	22
Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Riau	27
Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2022 BKD Provinsi Riau Tahun 2022	30
Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022	38
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Riau	41
Tabel 4.1 Rumusan Rencana dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renja SKPD	2
Gambar 1.2. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKD , Renstra Perangkat Daerah dengan Renja	2

BAB I

PENDAHULUAN

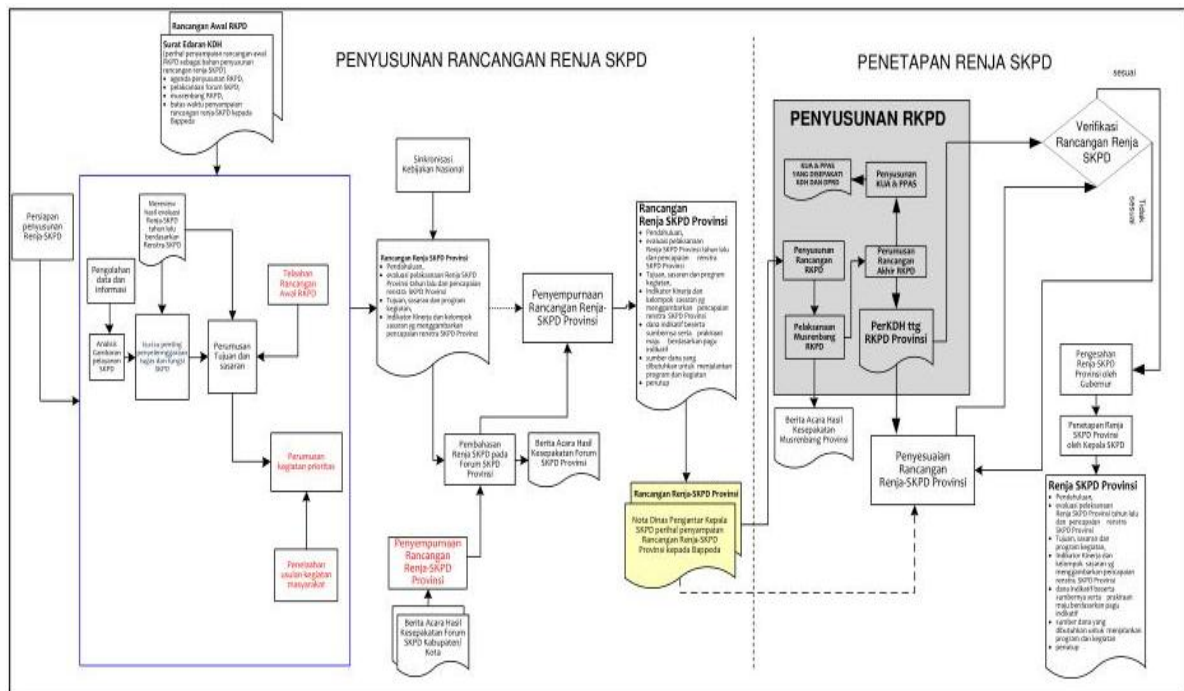
1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah ini juga merupakan sebuah dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

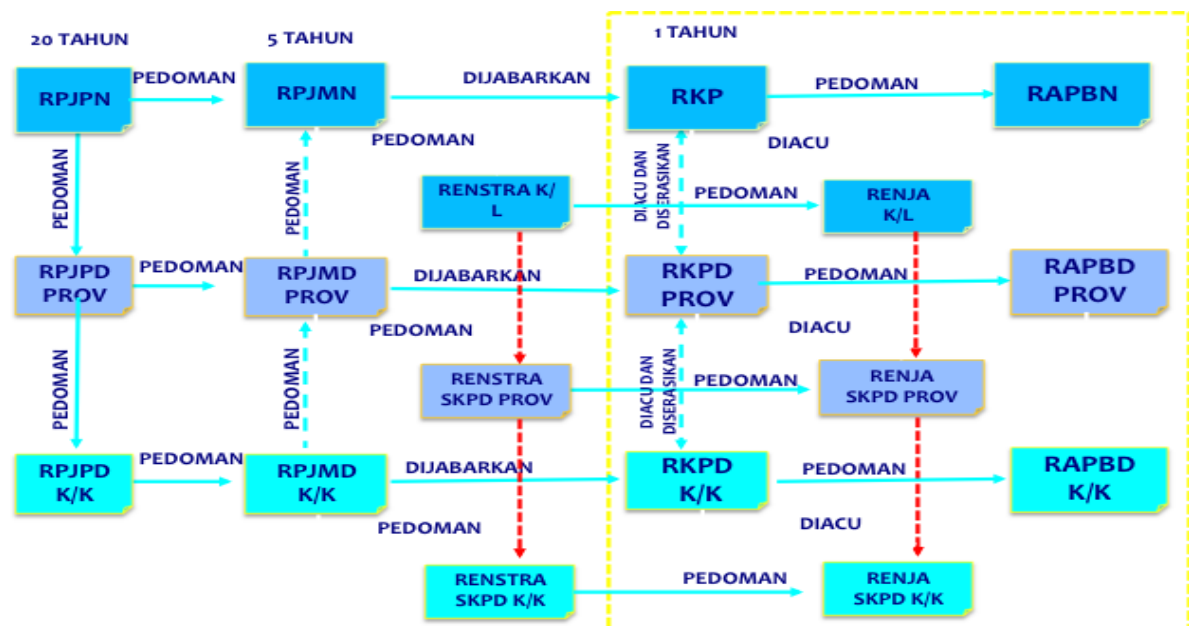
Renja Perangkat Daerah disusun dengan melalui beberapa tahapan yaitu:

- 1) Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
- 3) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;
- 4) Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
- 5) Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD; dan
- 6) Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renja SKPD



Gambar 1.2
keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD , Renstra Perangkat Daerah dengan Renja



Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan

pembangunan jangka menengah Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 telah mengamanatkan kepada Badan Kepegawaian Daerah sebagai perangkat daerah yang mengemban urusan pemerintahan penunjang urusan yaitu kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

RPJMD sebagai perencanaan pembangunan daerah telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya, perencanaan perangkat daerah 5 tahunan sebagaimana terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan yang bersifat lebih teknis dan operasional dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tahun 2021 menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Dalam prosesnya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau. Bappedalitbang melakukan verifikasi terhadap dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah agar dapat dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.

Setelah melalui proses verifikasi, Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Riau Tahun 2022.

1.1. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 (Berita acara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 590);
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12);
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11);
- 12) Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42);
- 13) Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 76);

- 14) Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 25).
- 15) Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Provinsi Riau Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 28).
- 16) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor: Kpts.900/BKD/1.1/I/2021/89 Tentang Tim Penyusun Renca Kerja BKD Provinsi Riau Tahun 2022.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rancangan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Provinsi Riau di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan rancangan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 adalah :

- 1) Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2022;
- 2) Sebagai instrumen evaluasi akuntabilitas kinerja di tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan kinerja.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2022 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dengan subbab sebagai berikut:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dengan subtransi bab sebagai berikut.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Riau Tahun 2020 dan Capaian Renstra BKD Provinsi Riau

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 yang telah diterjemahkan ke dalam dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau harus memperhatikan capaian rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada realisasi APBD Tahun 2020 dan Tahun 2021, yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya. Pencapaian rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau juga harus memperhatikan sasaran dan target program kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat tercapai.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2020. Laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah memuat capaian terhadap target tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan serta capaian realisasi anggaran pada masing – masing program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja ini merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang kepegawaian. Selain itu, Evaluasi pelaksanaan rencana kerja juga menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk penyusunan perencanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan pencapaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 sampai dengan tahun berjalan (2021) disajikan dalam format T-C.29 pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Provinsi Riau

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.00.	PENUNJANG URUSAN									
3.0.03.01.0.0.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
3.0.03.01.0.0.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim		2.424 surat						
3.0.03.01.0.0.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik		12 bulan						
3.0.03.01.0.0.00.01.003.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		23 unit						
3.0.03.01.0.0.00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12 bulan						
3.0.03.01.0.0.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		14 unit						
3.0.03.01.0.0.00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor		12 bulan						
3.0.03.01.0.0.00.01.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan						
3.0.03.01.0.0.00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor		12 bulan						
3.0.03.01.0.0.00.01.010.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		6.860 orang						
3.0.03.01.0.0.00.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah		131 Kali						
3.0.03.01.0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa administrasi kantor		12 bulan						
3.0.03.01.0.0.00.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan untuk pelaksanaan pengamanan kantor		12 bulan						
3.0.03.01.0.0.00.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan						
3.0.03.01.0.0.00.01.016.	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan SKPD	Rentan pengelolaan sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan BKD		12 bulan						
3.0.03.01.0.0.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
3.0.03.01.0.0.00.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilakukan BKD		2 unit						
3.0.03.01.0.0.00.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana peralatan gedung kantor		228 unit						
3.0.03.01.0.0.00.02.017.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor		228 unit						
3.0.03.01.0.0.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
3.0.03.01.0.0.00.03.006	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah Pegawai Negeri Sipil BKD yang terbina fisik dan mental aparatur		135 unit						
3.0.03.01.0.0.00.03.016	Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti konseling psikologi		75 unit						
3.0.03.01.0.0.00.05.	Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur									
3.0.03.01.0.0.00.05.001	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pendidikan, pelatihan, kursus dan bimtek		26 orang						
3.00.03	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
3.0.03.01.3.0.03.15.	Program Pendidikan Kedinasan									
3.0.03.01.3.0.03.15.008.	Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima Beasiswa tugas belajar		39 orang						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.0.03.01.3.0.03.15.009.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM I)		2 orang						
3.0.03.01.3.0.03.15.010.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM II)		1 orang						
3.0.03.01.3.0.03.15.016.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah Calon PNS yang mengikuti Pendidikan Kedinasan		54 orang						
3.0.03.01.3.0.03.16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur									
3.0.03.01.3.0.03.16.050.	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau	Jumlah asesor Provinsi Riau yang mengikuti peningkatan kapasitas		22 Orang						
3.0.03.01.3.0.03.16.068.	PORNAS Korpri	Jumlah peserta PORNAS KORPRI Provinsi Riau		32 orang						
3.0.03.01.3.0.03.16.072.	Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI	Jumlah kegiatan penyelenggaraan upacara HUT KORPRI		1 orang						
3.0.03.01.3.0.03.16.073.	Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI Yang Meninggal	Jumlah Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI yang dilaksanakan		4 kali						
3.0.03.01.3.0.03.16.080.	Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Fungsional Tertentu yang terfasilitasi mengikuti Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau		39 orang						
3.0.03.01.3.0.03.16.081.	Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat Teknis bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau pegawai Pemerintah Provinsi Riau		24 orang						
3.0.03.01.3.0.03.17.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur									
3.0.03.01.3.0.03.17.031.	Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima Satya Lencanakarya Satya		1.026 orang						
3.0.03.01.3.0.03.17.035.	Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau	Hasil monitoring PNS yang menerima TAPETARUM dan Jumlah PNS yang menerima TASPEN		499 dokumen						
3.0.03.01.3.0.03.17.066.	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	Hasil data SKP Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten/kota yang di monitoring		16.238 dokumen						
3.0.03.01.3.0.03.17.068.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah pengadaan Pegawai Negeri Sipil terlaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi yang ada		110 orang						
3.0.03.01.3.0.03.17.070.	Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Jumlah Pegawai negeri sipil yang mengikuti ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah		200 orang						
3.0.03.01.3.0.03.17.075.	Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)	Jumlah dokumen yang terpelihara		7.589 dokumen						
3.0.03.01.3.0.03.17.076.	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen data kepegawaian yang dikelola		4 Dokumen						
3.0.03.01.3.0.03.17.087.	Pemantauan disiplin PNS	Pemantauan disiplin PNS		2 dokumen						
3.0.03.01.3.0.03.17.088.	Penanganan Kasus kasus kepegawaian	Penanganan kasus-kasus kepegawaian		80 Kasus						
3.0.03.01.3.0.03.17.109.	Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan	Hasil Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan 12 Kabupaten Kota		1 dokumen						
3.0.03.01.3.0.03.17.114.	Pengembangan E-vernment Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah modul/fitur/perangkat untuk e-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau		1 Aplikasi						
3.0.03.01.3.0.03.17.115.	Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau	Jumlah jabatan tinggi yang terseleksi melalui uji kompetensi		34 orang						
3.0.03.01.3.0.03.17.137.	Penyusunan Standar Kompetensi Provinsi Riau	Jumlah standar kompetensi jabatan ASN yang disusun		1.180 Jabatan						
3.0.03.01.3.0.03.18.	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara									
3.0.03.01.3.0.03.18.001.	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	Jumlah penataan pindah tugas PNS yang dikelola		1.455 orang						
3.0.03.01.3.0.03.18.006.	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau	Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau		5.991 orang						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.0.03.01.3.0.03.18.008.	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Surat Keputusan Jabatan Fungsional Tertentu dilingkungan Pemda Provinsi Riau yang dikelola		1.640 SK						
3.0.03.01.3.0.03.18.011.	Pengelolaan Administrasi kepegawaian	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		266 berkas						
3.0.03.01.3.0.03.18.013.	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	Jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil yang disusun untuk diusulkan		250 Formasi PNS						
3.0.03.01.3.0.03.18.017.	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Adminitrator dan Pengawas dilingkungan Pemerintahan Provinsi Riau yang ditempatkan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya		497 Orang						
3.0.03.01.3.0.03.18.022.	Penyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik	jumlah Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik yang tersusun dan dikelola		1 dokumen						
3.0.03.01.3.0.03.18.023.	Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu		50 SK						
3.0.03.01.3.0.03.18.025.	Penyelenggaraan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/Kota se- Provinsi Riau	jumlah Dokumen Verifikasi usulan kenaikan pangkat		5.991 berkas						
3.0.03.01.3.0.03.18.026.	Pengelolaan Administrasi Penggunaan Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau	jumlah PNS yang mengusulkan usulan gelar		67 orang						
3.0.03.01.3.0.03.18.029.	Sistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau	Jumlah sistem aplikasi penatausahaan yang dikembangkan		1 Aplikasi						
3.0.03.01.3.0.03.19.	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur									
3.0.03.01.3.0.03.19.002.	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun		100 Orang						
3.0.03.01.3.0.03.19.005.	Pengelolaan Pensiun PNS	Jumlah SK pensiun PNS yang terselesaikan		220 Sk						
EVALUASI RENJA BERDASARKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 S/D 2024										
0.0.00.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
0.0.00.01.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	12500	Surat		1000	Surat	3248	Surat	324,80%
0.0.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	120	Rekening		24	Rekening	24	Rekening	100,00%
0.0.00.01.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	80	Unit		129	Unit	127	Unit	98,45%
0.0.00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100,00%
0.0.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	70	Unit		14	Unit	14	Unit	100,00%
0.0.00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	120	Jenis		27	Jenis	27	Jenis	100,00%
0.0.00.01.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	175	Jenis		27	Jenis	27	Jenis	100,00%
0.0.00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	155	Jenis		31	Jenis	31	Jenis	100,00%
0.0.00.01.010.	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	32600	Porsi		6390	Porsi	6400	Porsi	100,16%
0.0.00.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	850	Kali		88	Kali	134	Kali	152,27%
0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	11100	OB		648	OB	648	Orang Bulan	100,00%
0.0.00.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	1380	OB		276	OB	276	Orang Bulan	100,00%
0.0.00.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
0.0.00.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	10	Ruang		0	Ruang	0	Ruang	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
0.0.00.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1500	Unit		300	Unit	300	Unit	100,00%	311	Unit	611	40,73%
3.0.03.15.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA													
3.0.03.15.001.	Penyusunan Dokumen Kebutuhan dan Formasi ASN	Jumlah dokumen	7	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	2	28,57%
3.0.03.15.002.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data elektronik ASN yang dikelola secara update	12500	Data Elektronik		2500	Data Elektronik	2500	Data Elektronik	100,00%	2500	Data Elektronik	5000	40,00%
3.0.03.15.003.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang direkrut	1750	Orang		370	Orang	370	Orang	100,00%	350	Orang	720	41,14%
3.0.03.15.004.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah mahasiswa ikatan dinas yang difasilitasi	630	Orang		103	Orang	103	Orang	100,00%	126	Orang	229	36,35%
3.0.03.15.005.	Pengelolaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang difasilitasi	10000	Orang		200	orang	1	Dokumen	0,50%	145	Orang	146	1,46%
3.0.03.15.007.	Penataan PNS dalam Jabatan JPT dan Administrasi	Jumlah dokumen penataan	5	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	2	40,00%
3.0.03.15.008.	Pengelolaan Penataan PNS Pindah Tugas	Jumlah dokumen laporan penataan PNS pindah tugas	5	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	2	40,00%
3.0.03.15.009.	Penyusunan Analisis Evaluasi Mutasi, Rotasi dan Promosi	Jumlah dokumen analisis evaluasi mutasi, rotasi dan promosi yang tersusun	5	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	2	40,00%
3.0.03.15.010.	Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu Provinsi Riau	Jumlah dokumen pengelolaan dan evaluasi JFT	10	Dokumen		2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	2	Dokumen	4	40,00%
3.0.03.15.011.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah dokumen seleksi jabatan pimpinan tinggi	5	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	2	40,00%
3.0.03.15.012.	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah modul/fitur/perangkat manajemen kepegawaian yang dikembangkan	6	Modul		2	Modul	2	Modul	100,00%	1	Sistem / Aplikasi / Modul	3	50,00%
3.0.03.15.013.	Integrasi Sistem dan Pengelolaan Jaringan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah integrasi sistem dan jaringan yang dikelola	5	Modul		1	Modul	1	Modul	100,00%	1	Modul	2	40,00%
3.0.03.15.014.	Pengembangan Sistem Penilaian Kompetensi Provinsi Riau	Jumlah modul sistem penilaian kompetensi Provinsi Riau yang dikembangkan	4	Sistem							1	Modul	1	25,00%
3.0.03.15.016.	Pengelolaan Identitas dan Izin Kepegawaian	Jumlah ASN yang dikelola identitas dan izin kepegawaiannya	1750	Orang		250	Orang	250	Orang	100,00%	350	Orang	600	34,29%
3.0.03.15.017.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat dan Penggunaan Gelar ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota Se-Provinsi Riau	Jumlah berkas ASN yang dikelola	20000	Berkas		4000	Berkas	4000	Berkas	100,00%	4000	Berkas	8000	40,00%
3.0.03.15.018.	Pengelolaan Pensiun PNS	Jumlah PNS yang difasilitasi	30000	Orang		560	Orang	560	Orang	100,00%	600	Orang	1160	3,87%
3.0.03.15.019.	Pengelolaan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya	5000	Orang		1000	Orang	1000	Orang	100,00%	600	Orang	1600	32,00%
3.0.03.15.020.	Pengelolaan (LHKPN) Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Riau	Jumlah dokumen LHKPN Provinsi Riau yang dikelola	1795	Dokumen		359	Dokumen	359	Dokumen	100,00%	359	Dokumen	718	40,00%
3.0.03.15.021.	Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian dan Bantuan Hukum	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	350	Kasus		40	Kasus	40	Kasus	100,00%	70	Kasus	110	31,43%
3.0.03.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR													
3.0.03.17.001.	Penyelenggaraan Penilaian dan Analisis Kesenjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Jumlah dokumen	10	Dokumen		2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	2	Dokumen	4	40,00%
3.0.03.17.002.	Penyusunan Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau	Jumlah dokumen standar kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan	5	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	2	40,00%
3.0.03.17.003.	Pemetaan Jabatan, Evaluasi dan Penyusunan Talent Pool ASN Provinsi Riau	Jumlah dokumen pemetaan, evaluasi dan talent pool	10	Dokumen							2	Dokumen	2	20,00%
3.0.03.17.004.	Penyusunan Strategi Peningkatan Kompetensi	Jumlah dokumen strategi program dan kegiatan Peningkatan Kompetensi	2	Modul							1	Dokumen	1	50,00%
3.0.03.17.005.	Pemberian Beasiswa Tugas Belajar	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti tugas belajar	282	Orang		22	Orang	22	Orang	100,00%	33	Orang	55	19,50%
3.0.03.17.006.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional Tk I	5	Orang		0	Orang	0	Orang	100,00%	1	Orang	1	20,00%
3.0.03.17.007.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional Tk II	30	Orang		0	Orang	0	Orang	100,00%	5	Orang	5	16,67%
3.0.03.17.008.	Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti diklat fungsional	164	Orang		6	Orang	6	Orang	100,00%	15	Orang	21	12,80%
3.0.03.17.009.	Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	190	Orang		20	Orang	20	Orang	100,00%	8	Orang	28	14,74%
3.0.03.01.3.0.03.17.010.	Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)	Jumlah PNS yang terseleksi mengikuti Diklat PIM Tk. II, III, dan IV	50	Orang							15	Orang	15	30,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
3.0.03.17.011.	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau	Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assesor	100	Orang		18	Orang	18	Orang	100,00%	20	Orang	38	38,00%
3.0.03.17.012.	Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti magang dan praktik kerja	52	Orang							2	Orang	2	3,85%
3.0.03.17.013.	Pelaksanaan Konseling bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah ASN yang dikonseling	362	Orang							24	Orang	24	6,63%
3.0.03.17.014.	Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN	60	Kali		4	Kali	4	Kali	100,00%	12	Orang	16	26,67%
3.0.03.17.016.	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi dan Berkinerja Baik	Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan	96	Orang							16	Orang	16	16,67%
3.0.03.17.017.	Pembinaan KORPRI Provinsi Riau	Jumlah agenda pembinaan KORPRI	25	Agenda							3	Agenda	3	12,00%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat program dan kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Konsistensi pelaksanaan kegiatan;
- b. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan kegiatan;
- c. Koordinasi yang baik antar stakeholder baik internal maupun external BKD.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui pula terdapat 2 (dua) kegiatan yang melebihi target yaitu:

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan persentase 324,8%;
- 2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan persentase 152,27%.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 1.000 surat yang dikirim terealisasi sebesar 3.248 surat. Hal ini dikarenakan beberapa jenis surat tidak membutuhkan biaya pengiriman. Oleh sebab itu, dengan dana yang tersedia mampu menghasilkan keluaran (*output*) melebihi target yang ditetapkan. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan target 88 kali frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah terealisasi sebanyak 134 kali. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi pada setiap pelaksanaan perjalanan dinas, sehingga pagu yang tersedia dapat dioptimalkan untuk urusan-urusan koordinasi dan koordinasi keluar daerah dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi BKD Provinsi Riau.

Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat mencapai target secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Terhambatnya pelaksanaan kegiatan akibat wabah COVID-19;
- b. Adanya rasionalisasi anggaran;
- c. Adanya kegiatan yang tidak dijalankan karena kebijakan daerah;
- d. Adanya perubahan target kinerja terhadap kegiatan.

Implikasi yang ditimbulkan dengan tidak tercapainya target program dan kegiatan akan mempengaruhi capaian indikator kinerja yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, sehingga berdampak lambatnya pencapaian tujuan dan sasaran perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah. Memperhatikan kondisi tersebut, kebijakan yang diambil oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan yang tepat sasaran;
- b. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran;
- c. Memprioritaskan kegiatan yang strategis guna mendukung capaian tujuan sasaran kinerja perangkat daerah;
- d. Penetapan target indikator kinerja yang lebih terukur;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan secara berkala.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan serta UPT. Penilaian Kompetensi;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan serta UPT. Penilaian Kompetensi;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pada Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan serta UPT. Penilaian Kompetensi;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan serta UPT. Penilaian Kompetensi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau memiliki tujuan yaitu meningkatkan profesionalitas ASN dengan sasaran yang ingin dicapai melalui peningkatan manajemen pelayanan administrasi ASN serta pembinaan dan pengembangan ASN. Adapun indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagaimana terdapat dalam dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah:

- a. Indeks Profesionalitas ASN
- b. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian; dan
- c. Presentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik;

Capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau melalui capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan di dalam Renstra Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Riau disajikan dalam format T-C.30 pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Riau

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKD Provinsi Riau				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Profesionalisme ASN Provinsi Riau			45	50	55	60	50,09	50,37	55	60	
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			65 (B)	66 (B)	67 (B)	67 (B)	77,37 (B)	82,48 (B)	79,00 (B)	80 (B)	
3	Presentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik			70 %	75 %	80 %	82 %	99,00 %	99,66 %	99,00 %	99,00 %	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sudah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama ini mengacu pada dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dimana tidak terdapat Indikator NSPK, SPM Nasional maupun IKK tertentu.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memasuki tahun perencanaan 2022, setidaknya terdapat 40 arah kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2022. Di antara 40 arah kebijakan tersebut, terdapat 4 arah kebijakan prioritas yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian daerah Provinsi Riau Tahun 2022, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi
- 2) Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan publik
- 3) Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan
- 4) Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan

Keempat agenda prioritas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yaitu:

- 1) Indeks Profesionalitas ASN
- 2) Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
- 3) Presentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik

Terkait dengan Indikator Kinerja Utama tersebut, berikut ini akan diuraikan capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam upaya pemenuhan target Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2020 sebagai berikut:

- 1) Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Tingkat profesionalitas ASN dipengaruhi oleh beberapa dimensi, yaitu:

- a. Kompetensi (Dimensi yang digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan). Bobot dimensi ini sebesar 40%.
- b. Kualifikasi Pendidikan (Dimensi ini digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah). Bobot dimensi ini sebesar 25%.
- c. Disiplin (Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS). Bobot dimensi ini sebesar 5%.
- d. Kinerja (Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja

pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS). Bobot dimensi ini sebesar 30%.

Adapun capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 adalah 50,09. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 45.

2) Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Untuk mendukung visi dan misi Gubernur Riau, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau memiliki tujuan mewujudkan Profesionalisme ASN dengan salah satu sasarnya yaitu meningkatkan manajemen pelayanan. Adapun indikator kinerja dari sasaran tersebut diukur dengan Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dapat diperoleh dengan melakukan *survey kepuasan pelayanan* secara berkala berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Demikian juga halnya dalam pemberian pelayanan publik kepada ASN, BKD Provinsi Riau selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan kepada ASN selaku pengguna jasa pelayanan. Salah satu upaya yang dilakukan BKD Provinsi Riau adalah dengan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan dengan mengukur tingkat kepuasan Aparatur Sipil Negara terhadap kualitas pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau melalui *survey kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian* dengan indikator kinerja berupa Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Adapun Unsur pelayanan yang merupakan faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada ASN sebagai variabel penyusunan Survey kepuasan pelayanan kepegawaian terdiri dari persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana. Adapun capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 adalah 77,4 dengan kategori Baik. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 65.

3) Presentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik

BKD Provinsi Riau juga memiliki sasaran yang lain dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatkan pembinaan dan pengembangan ASN dengan indikator kinerjanya Presentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik. Formulasi yang digunakan untuk mengukur persentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik yaitu jumlah PNS Provinsi Riau yang berkinerja baik dibagi dengan

jumlah seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Riau sehingga memiliki nilai capaian indikator kinerja pada tahun 2020 sejumlah 99 %.

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan pada Tahun 2022, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dicapai yaitu:

- a. Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Riau;
- b. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian;
- c. Presentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik.

Upaya pencapaian indikator kinerja dimaksud didukung oleh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap tahunnya. Berikut disampaikan beberapa penjelasan terkait masing-masing indikator kinerja berdasarkan hasil pencapaian kinerjanya pada tahun 2020.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DJASN BKN pada Tahun 2020, penilaian Indeks Profesionalitas ASN untuk Provinsi Riau masih 50,09 dan tergolong sangat rendah karena termasuk dalam rentang nilai 60 ke bawah. Penggolongan ataupun kategori tersebut telah diatur di dalam Perka BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pencapaian bobot Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN BKD Provinsi Riau terhadap 4 komponen pengukuran yaitu kompetensi, kualifikasi pendidikan, disiplin dan kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.
Nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Riau Tahun 2020

No	Jumlah PNS	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	14.934	13.89	8.23	22.97	5	50.09

Sumber : DJASN, 2020

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa unsur yang paling rendah nilainya berada pada dimensi kompetensi, yaitu sebesar 8,32. Sedangkan sesuai dengan Perka BKN No. 8 Tahun 2019 disebutkan bahwa untuk unsur kompetensi pada Penilaian Indeks Profesionalitas ASN memiliki bobot pengukuran sebesar 40%. Dari data di atas terlihat jelas bahwa unsur kompetensi pada pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Riau masih di bawah bobot yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan antara lain karena masih rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang disebabkan adanya pandemi *Covid-19*. Hal ini mengakibatkan beberapa agenda diklat batal dilaksanakan baik oleh Pemerintah Provinsi Riau sendiri maupun diklat-diklat yang dilaksanakan oleh

Kementerian/Lembaga. Selain itu, pandemi *Covid-19* juga berdampak pada kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Riau yang mengakibatkan beberapa agenda diklat tidak terlaksana.

Sementara itu, untuk Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian melalui hasil pengukuran terhadap Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian BKD Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4.
Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian
BKD Provinsi Riau Tahun 2020

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG
1	2	3
1.	Persyaratan	0,33
2.	Prosedur	0,33
3.	Waktu Pelayanan	0,30
4.	Biaya/Tarif	0,44
5.	Produk Pelayanan	0,34
6.	Kompetensi Pelaksana	0,33
7.	Perilaku Pelaksana	0,35
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0,32
9.	Sarana dan Prasarana	0,33

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa, dari 9 unsur pelayanan secara keseluruhan diperoleh nilai rata-rata 3,09, Indeks kepuasan pelayanan 77,37, dan mutu pelayanan Baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020, BKD Provinsi Riau memiliki pelayanan yang prima terhadap pegawai pemerintah Provinsi Riau yang ditunjukkan melalui capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian sebesar 77.37 (B).

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Dalam upaya mencapai target kinerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hal ini tentu akan berdampak pada upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau perlu untuk mengelola tantangan tersebut dengan meningkatkan kinerja melalui peluang-peluang yang ada dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat pada 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5.
Pemetaan Permasalahan dan Hambatan

No	Indikator Kinerja Utama	Permasalahan	Hambatan
1	2	3	4
1.	Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Riau	1. Kurangnya kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Riau 2. Belum efektifnya manajemen kualifikasi pendidikan ASN 3. Tingkat kedisiplinan pegawai yang rendah	1. Belum efektifnya upaya peningkatan kompetensi 2. Belum efektifnya pelaksanaan diklat 1. Belum adanya tuntutan peningkatan jenjang pendidikan 2. Belum sesuai antara penempatan dan kualifikasi pendidikan 1. Kurangnya penegakkan disiplin, kode etik dan perilaku ASN
2.	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Masih rendahnya nilai waktu pelayanan	Proses pelayanan yang lama dan tidak tepat waktu
3.	Persentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik	Belum seluruh ASN berkinerja baik	Kurangnya pembinaan terhadap ASN

Sumber: BKD Provinsi Riau, 2020

Sekalipun adanya permasalahan dan hambatan yang dialami terkait pelaksanaan proses pencapaian target kinerja BKD Provinsi Riau, namun dalam hal ini seluruh target kinerja telah tercapai dengan maksimal sebagaimana data yang telah ditampilkan pada tabel T.C.30 di atas.

Uraian Pemetaan Permasalahan dan Hambatan sebagaimana dikemukakan di atas masih sangat relevan dan masih menjadi isu strategis yang dihadapi oleh BKD Provinsi Riau dalam rangka pencapaian target kinerja di tahun 2021 dan proyeksi tahun 2022.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah tidak tercapainya Misi Kepala Daerah yang ke lima yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi”***. yang bertujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan sasaran:

1. Meningkatnya penerapan dengan indikator sasaran: Indeks reformasi birokrasi
2. Meningkatnya penerapan *e-government* dengan indikator sasaran: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Peluang yang diharapkan dalam meningkatkan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau antara lain:

1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum maksimal;
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Kerjasama dengan lembaga lainnya dalam pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara;
4. Kemajuan teknologi informasi atau elektronik government (*e-government*) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah:

1. Implementasi Sistem Merit;
2. Pengadaan PNS untuk pemenuhan kebutuhan formasi;
3. Pengembangan Karier;
4. Penataan Gaji dan Perlindungan;
5. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Pengembangan Kelembagaan;
7. Penataan Pegawai sesuai dengan kompetensinya

Peluang dan tantangan sebagaimana dikemukakan di atas masih sangat relevan dan masih menjadi isu strategis yang dihadapi oleh BKD Provinsi Riau dalam rangka pencapaian target kinerja di tahun 2021 dan proyeksi tahun 2022.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Beberapa isu-isu penting yang dapat direkomendasikan sebagai catatan strategis sebelum dirumuskannya program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2022 adalah :

1. Masih belum optimalnya waktu pelayanan terhadap ASN
2. Kurangnya kompetensi ASN
3. Belum seluruh ASN berkinerja baik

Berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi sebagaimana diuraikan di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merumuskan beberapa program yang akan dilaksanakan pada rencana kerja tahunan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara; dan
2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur.

Program-program tersebut didukung oleh serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja organisasi dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa setidaknya terdapat 40 arah kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2022. Di antara 40 arah kebijakan tersebut, terdapat 4 arah kebijakan prioritas yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian daerah Provinsi Riau Tahun 2022, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi
- 2) Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan publik
- 3) Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan
- 4) Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan

Keempat agenda prioritas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yaitu:

- 1) Indeks Profesionalitas ASN
- 2) Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
- 3) Presentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik

Rancangan awal RKPD merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rumusan usulan program dan kegiatan yang dituangkan dalam rancangan awal RKPD adalah suatu tahapan yang digunakan bagi Perangkat Daerah untuk memuat kebutuhan rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya. Tahapan penyusunan rencana kerja ini melalui proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penjelasan mengenai analisa kebutuhan rencana kerja perangkat daerah tersebut dilakukan apabila adanya temuan-temuan rencana kerja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Adapun kondisi yang ditemukan pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2022 dengan membandingkannya dengan analisis kebutuhan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Antara Rancangan Awal RKPD dan analisis kebutuhan tidak terdapat usulan kegiatan baru;
- b. Pagu perangkat daerah dan sebarannya pada tiap – tiap kegiatan sebagaimana terdapat pada Rancangan Awal RKPD belum sesuai dengan analisis kebutuhan perangkat daerah;

- c. Beberapa kegiatan pada Rancangan Awal RKPD masih memiliki target terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang diberikan sehingga dapat diperkirakan tidak akan tercapai dengan pagu dimaksud;
- d. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap target beberapa kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Awal RKPD untuk mengakomodir kebutuhan pencapaian beberapa agenda strategis seperti Fasilitasi Tugas Belajar PNS, Seleksi CPNS dan PPPK, Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk Pemetaan Jabatan/Talent Pool, dan lain-lain.

Selain beberapa hal yang dikemukakan di atas, BKD Provinsi Riau perlu melakukan pemetaan kembali terhadap rumusan nomenklatur Program dan Kegiatan pada Tahun 2022 untuk dilakukan sinkronisasi terhadap dokumen RKPD Provinsi Riau Tahun 2022. Hal ini dikarenakan rumusan program yang ada dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang selanjutnya diturunkan ke dalam RKPD Tahun 2022 masih menggunakan nomenklatur lama sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, review terhadap Rancangan Awal RKPD dengan kebutuhan BKD Provinsi Riau Tahun 2022 selengkapnya dikemukakan pada tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Provinsi Riau

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	100%	6.032.721.591	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	100%	6.652.601.891	
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat yang dikirim	2.500 Surat	14.776.665	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat yang dikirim	2.500 Surat	15.055.470	
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Rekening Yang Dibayar	24 Rekening	1.052.662.317	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Rekening Yang Dibayar	24 Rekening	1.121.530.228	
01.003.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Unit	226.344.366	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	13 Unit	465.917.724	
01.004.	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	801.852.317	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	810.917.724	
01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional		Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 Unit	196.344.366	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional		Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 Unit	230.917.724	
01.007.	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang disediakan	25 Jenis	162.211.266	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang disediakan	25 Jenis	196.784.624	
01.008.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Jenis Laporan Yang Dicitak dan Digandakan	25 Jenis	144.857.616	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Jenis Laporan Yang Dicitak dan Digandakan	25 Jenis	179.430.974	
01.009.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	31 Jenis	97.036.166	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	31 Jenis	131.609.524	
01.010.	Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	6.400 Porsi	191.359.366	Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	6.400 Porsi	225.932.724	
01.011.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar DaerahFrekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	160 Kali	851.852.317	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar DaerahFrekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	160 Kali	860.917.724	
01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor		Rentang waktu penyediaan jasa administrasi kantor	2.220 Orang Bulan	1.500.836.415	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor		Rentan waktu penyediaan jasa administrasi kantor	2.220 Orang Bulan	1.560.917.724	
01.013.	Penyediaan jasa keamanan kantor		Jumlah tenaga satpam yang disediakan	276 Orang Bulan	792.588.415	Penyediaan jasa keamanan kantor		Jumlah tenaga satpam yang disediakan	276 Orang Bulan	852.669.724	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	100%	844.240.701	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	100%	902.300.538	
02.012.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	2 Ruang	644.240.701	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	2 Ruang	702.300.538	
02.016.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	300 Unit	200.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	300 Unit	200.000.000	
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	100%	253.272.210	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	100%	270.690.162	
03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	135 Orang	122.072.210	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	135 Stell	142.690.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03.003.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	135 Orang	131.200.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	135 Stel	128.000.162	
015	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara		Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan	100%	3.895.608.171	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara		Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan	100%	4.958.553.464	
15.001.	Penyusunan Dokumen Kebutuhan dan Formasi ASN		Jumlah Dokumen Renstra Pengadaan Kebutuhan ASN Provinsi Riau	1 Dokumen	126.166.733	Penyusunan Dokumen Kebutuhan dan Formasi ASN		Jumlah Dokumen Renstra Pengadaan Kebutuhan ASN Provinsi Riau	1 Dokumen	126.166.733	
15.002.	Pengelolaan data kepegawaian		Jumlah data elektronik ASN yang dikelola secara update	2.500 Data Elektronik	99.835.580	Pengelolaan data kepegawaian		Jumlah data elektronik ASN yang dikelola secara update	2.500 Data Elektronik	120.000.000	
15.003.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara		Jumlah ASN yang direkrut	350 Orang	300.000.000	Pengadaan Aparatur Sipil Negara		Jumlah ASN yang direkrut	350 Orang	1.145.037.838	
15.004.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas		Jumlah mahasiswa Ikatan Dinas yang difasilitasi	126 Orang	300.000.000	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas		Jumlah mahasiswa Ikatan Dinas yang difasilitasi	126 Orang	300.000.000	
15.005.	Pengelolaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah		Jumlah ASN yang difasilitasi	200 Orang	80.000.000	Pengelolaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah		Jumlah ASN yang difasilitasi	200 Orang	100.000.000	
15.007.	Penataan PNS dalam Jabatan JPT dan Administrasi		Jumlah dokumen penataan PNS	1 Dokumen	307.591.507	Penataan PNS dalam Jabatan JPT dan Administrasi		Jumlah dokumen penataan PNS	1 Dokumen	307.591.507	
15.008.	Pengelolaan penataan PNS Pindah Tugas		Jumlah Dokumen Laporan Penataan PNS Pindah Tugas	1 Dokumen	160.628.502	Pengelolaan penataan PNS Pindah Tugas		Jumlah Dokumen Laporan Penataan PNS Pindah Tugas	1 Dokumen	160.628.502	
15.009.	Penyusunan analisis evaluasi mutasi, rotasi dan promosi		Jumlah Dokumen Analisis Evaluasi Mutasi, Rotasi dan Promosi yang tersusun	1 Dokumen	70.000.000	Penyusunan analisis evaluasi mutasi, rotasi dan promosi		Jumlah Dokumen Analisis Evaluasi Mutasi, Rotasi dan Promosi yang tersusun	1 Dokumen	70.000.000	
15.010.	Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu Provinsi Riau		Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Evaluasi JFT	2 Dokumen	350.000.000	Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu Provinsi Riau		Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Evaluasi JFT	2 Dokumen	350.000.000	
15.011.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		Jumlah Dokumen seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	1 Dokumen	200.000.000	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		Jumlah Dokumen seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	1 Dokumen	200.000.000	
15.012.	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Provinsi Riau		Jumlah modul/fitur/perangkat manajemen kepegawaian yang dikembangkan	1 Sistem/Aplikasi/Modul	200.000.000	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Provinsi Riau		Jumlah modul/fitur/perangkat manajemen kepegawaian yang dikembangkan	1 Sistem/Aplikasi/Modul	200.000.000	
15.013.	Integrasi Sistem dan Pengelolaan Jaringan Pelayanan Kepegawaian		Jumlah Integrasi Sistem dan Jaringan yang dikelola	1 Modul	120.000.000	Integrasi Sistem dan Pengelolaan Jaringan Pelayanan Kepegawaian		Jumlah Integrasi Sistem dan Jaringan yang dikelola	1 Modul	139.128.884	
15.014.	Pengembangan Sistem Penilaian Kompetensi Provinsi Riau		Jumlah modul sistem penilaian kompetensi Provinsi Riau yang dikembangkan	1 Modul	150.000.000	Pengembangan Sistem Penilaian Kompetensi Provinsi Riau		Jumlah modul sistem penilaian kompetensi Provinsi Riau yang dikembangkan	1 Modul	150.000.000	
15.016.	Pengelolaan Identitas dan Izin Kepegawaian		Jumlah ASN yang dikelola identitas dan izin kepegawaiannya	350 Orang	150.000.000	Pengelolaan Identitas dan Izin Kepegawaian		Jumlah ASN yang dikelola identitas dan izin kepegawaiannya	350 Orang	200.000.000	
15.017.	Pengelolaan kenaikan pangkat dan Penggunaan Gelar ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau		Jumlah berkas ASN yang dikelola	4000 Berkas	624.555.000	Pengelolaan kenaikan pangkat dan Penggunaan Gelar ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau		Jumlah berkas ASN yang dikelola	4000 Berkas	650.000.000	
15.018.	Pengelolaan pensiun PNS		Jumlah PNS yang difasilitasi	600 Orang	300.000.000	Pengelolaan pensiun PNS		Jumlah PNS yang difasilitasi	600 Orang	350.000.000	
15.019.	Pengelolaan Satya Lencana Karya Satya		Jumlah PNS yang menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	1.000 Orang	100.000.000	Pengelolaan Satya Lencana Karya Satya		Jumlah PNS yang menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	1.000 Orang	120.000.000	
15.020.	Pengelolaan (LHKPN) pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Riau		Jumlah Dokumen LHKPN Provinsi Riau yang dikelola	359 Dokumen	106.830.849	Pengelolaan (LHKPN) pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Riau		Jumlah Dokumen LHKPN Provinsi Riau yang dikelola	359 Dokumen	120.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.021.	Penanganan kasus - kasus kepegawaian dan Bantuan Hukum		Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	70 Kasus	150.000.000	Penanganan kasus - kasus kepegawaian dan Bantuan Hukum		Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	50 Kasus	150.000.000	
017	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur		Persentase Jumlah Penataan Pengembangan Manajemen ASN Yang Profesional	100%	5.678.120.086	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur		Persentase Jumlah Penataan Pengembangan Manajemen ASN Yang Profesional	100%	7.996.134.191	
17.001.	Penyelenggaraan Penilaian dan Analisis Kesenjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau		Jumlah dokumen	2 Dokumen	70.000.000	Penyelenggaraan Penilaian dan Analisis Kesenjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau		Jumlah dokumen	2 Dokumen	70.000.000	
17.002.	Penyusunan Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau		Jumlah dokumen standar kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau		Jumlah dokumen standar kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan	1 Dokumen	100.000.000	
17.003.	Pemetaan Jabatan, Evaluasi dan Penyusunan Talent Pool ASN Provinsi Riau		Jumlah Dokumen Pemetaan, Evaluasi dan Talent Pool	2 Dokumen	150.000.000	Pemetaan Jabatan, Evaluasi dan Penyusunan Talent Pool ASN Provinsi Riau		Jumlah Dokumen Pemetaan, Evaluasi dan Talent Pool	2 Dokumen	514.769.742	
17.005.	Pemberian beasiswa tugas belajar		Jumlah PNS yang Terfasilitasi Mengikuti Tugas Belajar	33 Orang	3.400.000.000	Pemberian beasiswa tugas belajar		Jumlah PNS yang Terfasilitasi Mengikuti Tugas Belajar	24 Orang	4.000.000.000	
17.006.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM I)		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk I	1 Orang	81.483.600	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM I)		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk I	1 Orang	159.465.780	
17.007.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM II)		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II	6 Orang	250.000.000	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM II)		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II	6 Orang	757.239.117	
17.008.	Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Diklat Fungsional	40 Orang	250.000.000	Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Diklat Fungsional	40 Orang	600.000.000	
17.009.	Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	45 Orang	222.693.386	Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	45 Orang	526.034.567	
17.011.	Penyelenggaraan peningkatan kapasitas asesor Provinsi Riau		Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assessor	20 Orang	246.808.000	Penyelenggaraan peningkatan kapasitas asesor Provinsi Riau		Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assessor	20 Orang	303.803.205	
17.012.	Pelaksanaan magang/praktik kerja		Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti magang dan prktik kerja	7 Orang	200.000.000	Pelaksanaan magang/praktik kerja		Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti magang dan prktik kerja	10 Orang	257.686.680	
17.013.	Pelaksanaan Konseling bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau		Jumlah ASN yang dikonseling	80 Orang	100.000.000	Pelaksanaan Konseling bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau		Jumlah ASN yang dikonseling	80 Orang	100.000.000	
17.014.	Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN		Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN	12 Kali	107.135.100	Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN		Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN	12 Kali	107.135.100	
17.016.	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi dan berkinerja baik		Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan	22 Orang	400.000.000	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi dan berkinerja baik		Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan	22 Orang	400.000.000	
17.017.	Pembinaan KORPRI Provinsi Riau		Jumlah Agenda Pembinaan KORPRI	5 Agenda	100.000.000	Pembinaan KORPRI Provinsi Riau		Jumlah Agenda Pembinaan KORPRI	5 Agenda	100.000.000	
JUMLAH					16.703.962.760	JUMLAH					20.780.280.245

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan diusulkan pada dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mengacu pada tugas pokok dan fungsi yaitu terkait administrasi kepegawaian, pengembangan, pembinaan dan evaluasi kinerja bagi Aparatur Sipil Negara. Sehingga berdasarkan dengan hal tersebut, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya, tetapi berupa program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
BKD Provinsi Riau Tahun 2022

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

N I H I L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam proses penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang termasuk di dalamnya dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, wajib memperhatikan kebijakan – kebijakan di tingkat pusat terutama dari Kementerian/Lembaga yang terkait dengan urusan administrasi dan pengembangan kompetensi kepegawaian. Telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau meliputi 5 (lima) Kementerian/ Lembaga yaitu Kemepan - RB, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

3.1.1 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN-RB memiliki visi ***“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”***, didukung oleh 9 Misi, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6) Penegakkan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian PANRB sebagai kementerian yang membidangi tentang pendayagunaan aparatur negara, berperan sebagai *prime mover* dalam mendorong profesionalisme dan integritas dari aparatur negaranya agar mencapai pemerintahan yang berkelas dunia. Dalam mewujudkan Kementerian PANRB sebagai institusi pemerintahan yang berkelas dunia, Kementerian PANRB melakukan pembenahan birokrasi internal, menciptakan kelembagaan dan tata kelola birokrasi yang ramping berbasis elektronik. Membangun SDM, mengembangkan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah, menciptakan sistem pengawasan, mewujudkan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Kementerian PANRB menetapkan nilai-nilai yang menjadi dasar dan pondasi bagi institusi Kementerian PANRB, pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap, yaitu:

- 1) Integritas
- 2) Profesional
- 3) Akuntabel
- 4) Melayani
- 5) Inovatif
- 6) Kesempurnaan (Komitmen pada Kualitas)

Beberapa program strategis Kementerian PAN-RB yang dapat diadopsi dan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau antara lain:

- 1) Program Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
- 2) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Beberapa hal yang dikemukakan di atas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian Daerah, yaitu Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur, dan Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

3.1.2 Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara. Kebijakan strategis BKD termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Negara 2020- 2024 yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Badan Kepegawaian Negara sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

selama 2020-2024.

Visi yang ingin diwujudkan oleh BKN adalah ***"Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"***. Visi tersebut dicapai melalui 5 (lima) misi, yaitu:

- 1) Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
- 2) Penyelenggaraan manajemen ASN,
- 3) Penyimpanan informasi pegawai ASN,
- 4) Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN
- 5) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN

Menjabarkan misi pembangunan Badan Kepegawaian Negara, maka tujuan pembangunan Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN.
- 2) Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima sebagai sarana Mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis.
- 3) Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit.
- 4) Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi & misi organisasi.

Beberapa program strategis BKN yang dapat diadopsi dan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau antara lain:

- 1) Program Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola (Co-Program bersama LAN)
- 2) Program Dukungan Manajemen

Gambaran kebijakan strategis BKN tahun 2020-2024 di atas memberikan arah dalam dalam penyusunan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara, yaitu Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dan Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya diturunkan ke dalam dokumen rencana kerja tahunan.

3.1.3 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Lembaga Administrasi Negara yang disingkat LAN, adalah Lembaga

Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

LAN menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagai kebijakan dalam menindaklanjuti isu-isu strategis dan diarahkan pada penguatan LAN sebagai institusi pembelajar berkelas dunia melalui pengembangan kompetensi aparatur, kebijakan dan inovasi Administrasi Negara dalam mendukung pembangunan nasional. Perumusan arah kebijakan dan strategi yang akan dikembangkan oleh LAN untuk mewujudkan visi dan misi LAN dilakukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional, terutama yang telah digariskan dalam RPJMN tahun 2020-2024.

Sebagai salah satu instrumen pembangunan nasional, LAN secara langsung berkontribusi pada agenda pembangunan “Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, sehingga visi LAN juga harus diarahkan pada pencapaian agenda pembangunan tersebut, yaitu untuk memastikan negara terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Secara spesifik, LAN juga merupakan salah satu aktor utama dalam program reformasi birokrasi nasional. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah menetapkan visi reformasi birokrasi untuk “mewujudkan pemerintahan berkelas dunia”. Dengan demikian, LAN juga harus mengarahkan kebijakan dan strategi untuk mewujudkan visi tersebut.

Dengan mempertimbangkan peran LAN dalam pembangunan nasional dan program reformasi birokrasi nasional, serta mendukung visi RPJMN tahun 2020-2024, visi LAN 2020-2024 merupakan gambaran atas kondisi, posisi, dan peran LAN dalam kedua kerangka kebijakan tersebut dirumuskan sebagai berikut.

“Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan *World Class Government* Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Untuk mewujudkan visi LAN dan mendukung visi Presiden, LAN melaksanakan misi Presiden dan wakil presiden nomor 1 yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia yaitu.

- 1) Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional
- 2) Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis evidence dan penyediaan analisis kebijakan yang kompeten
- 3) Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi

- 4) Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik.

Beberapa program strategis LAN yang dapat diadopsi dan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau antara lain:

- 1) Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN (Co-Program bersama BKN dan KASN)
- 2) Program Dukungan Manajemen

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan program pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Dengan adanya sinergitas ini, diharapkan ASN kelas dunia dapat terwujud khususnya dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

3.1.4 Komisi Aparatur Sipil Negara

Komisi Aparatur Sipil Negara yang disingkat KASN merupakan lembaga independen yang baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bertugas menjaga netralitas Pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.

Visi yang ingin diwujudkan KASN adalah ***“Mendukung Visi Presiden melalui Terwujudnya ASN Kelas Dunia”***

Sedangkan misi yang dilaksanakan untuk pencapaian visi tersebut adalah :

- 1) Mengawasi pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas, serta penerapan Sistem Merit dalam Kebijakan dan Manajemen ASN
- 2) Melaksanakan Tata Kelola KASN yang mandiri, profesional dan Akuntabel.

Dengan mengacu pada rencana strategis KASN diketahui bahwa Sistem Merit dalam Manajemen ASN merupakan pilar utama mewujudkan ASN Kelas Dunia. Untuk itu, BKD Provinsi Riau, dalam merumuskan program dan kegiatan tidak terlepas dari 8 agenda Sistem Merit, yaitu:

- 1) Penerapan aspek perencanaan kebutuhan pegawai
- 2) Penerapan aspek pengadaan pegawai
- 3) Penerapan aspek pengembangan karier dan peningkatan kompetensi pegawai.
- 4) Penerapan aspek promosi, rotasi, dan mutasi
- 5) Penerapan aspek manajemen kinerja pegawai
- 6) Penerapan aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin
- 7) Penerapan aspek perlindungan dan pemberian kemudahan
- 8) Penerapan aspek sistem informasi kepegawaian.

Beberapa program strategis KASN yang dapat diadopsi dan menjadi

pedoman bagi Badan Kepegawaan Daerah Provinsi Riau antara lain:

- 1) Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN (Co-Program bersama BKN dan LAN)
- 2) Program Dukungan Manajemen

3.1.5 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dan dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud, maka diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak.

Mengacu pada pertimbangan tersebut di atas, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tanggal 20 Juli 2018. Selanjutnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan menyusun dan menetapkan Keputusan Bersama tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 - 2020.

Tim Nasional Pencegahan Korupsi dibentuk untuk menyelenggarakan Stranas PK. Timnas PK terdiri atas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, kepala lembaga non-struktural yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis, serta unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Timnas PK berwenang menyusun langkah kebijakan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Aksi PK.

Terdapat 3 Fokus Utama dalam Stranas PK yaitu:

- 1) Perizinan dan Tata Niaga
- 2) Keuangan Negara
- 3) Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu fokus utama karena akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara. Manfaat yang akan diperoleh dalam pelaksanaan fokus strategi ini yaitu:

- 1) Berkurangnya Praktik Jual-Beli Jabatan sehingga meningkatkan Kinerja dan manajemen ASN yang profesional

- 2) Pelayanan publik menjadi lebih transparan, cepat, mudah karena berkurangnya gratifikasi
- 3) Pengawasan internal menjadi lebih objektif, independen
- 4) Kelembagaan Pemerintah yang tepat fungsi dan ukuran sehingga pengambilan keputusan lebih cepat dan efisien anggaran
- 5) Pengambilan kebijakan, pelayanan administrasi pemerintahan, pelayanan publik efektif, terpadu, dan aman karena pengambilan keputusan lebih cepat.

Salah satu sub aksi dalam Stranas PK yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BKD Provinsi Riau adalah Percepatan Sistem Merit. Selama ini, mulai dari hilir ke hulu atau mulai dari penerimaan, mutasi hingga kenaikan jabatan, masih sering ditemukan dilakukan dengan cara yang tertutup. Praktik jual beli jabatan dan ASN yang tidak netral telah menjadi gambaran semua jenjang manajemen kepegawaian. Belum lagi dengan manajemen data kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN yang belum dikelola secara terintegrasi. Oleh karenanya, aksi ini diharapkan dapat berkontribusi pada dua aspek, pertama terciptanya manajemen satu data ASN; kedua, terciptanya manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang seseorang.

Mengingat pentingnya sistem merit sebagai kebijakan nasional dan rencana aksi KPK, maka Pemerintah Provinsi Riau merespon kebijakan dimaksud pada penyelenggaraan pemerintah daerah, melalui program dan kegiatan yang ada. Ke depannya diharapkan implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN dapat sepenuhnya terlaksana di Provinsi Riau.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun.

Dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan tahun ke tiga dalam konteks perencanaan lima tahunan dari 2019 s.d 2024. Adapun tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1.

**Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Riau Tahun 2022**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Profesionalisme ASN di Provinsi Riau		Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Riau	55	60
		1. Meningkatnya Manajemen Pelayanan ASN	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	67	69
		2. Meningkatnya Pembinaan dan Disiplin ASN	Presentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik	80	82

Sumber: Renstra BKD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024

Tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan di atas selaras dengan 4 arah kebijakan prioritas yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2022, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi
- 2) Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan publik
- 3) Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan
- 4) Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Isu Strategis Nasional seperti implementasi Reformasi Birokrasi, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN, peningkatan pelayanan publik, dan sebagainya
- b. Program strategis Kementerian/Lembaga terkait SDM aparatur
- c. Pagu indikatif dalam Rancangan Awal RKPD

- d. Hasil kesepakatan para pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah;
- e. Realisasi capaian sampai dengan tahun berjalan
- f. Target Renstra BKD Provinsi Riau sampai Tahun 2024
- g. Penyesuaian terhadap kondisi eksisting seperti adaptasi kebiasaan baru dampak pandemi Covid-19.

Adapun uraian mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
 - f. Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i. Penyediaan makanan dan minuman
 - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - k. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
 - l. Penyediaan jasa keamanan kantor
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 3) Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 4) Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
 - a. Penyusunan Dokumen Kebutuhan dan Formasi ASN
 - b. Pengelolaan data kepegawaian
 - c. Pengadaan Aparatur Sipil Negara
 - d. Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas
 - e. Pengelolaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
 - f. Penataan PNS dalam Jabatan JPT dan Administrasi
 - g. Pengelolaan penataan PNS Pindah Tugas
 - h. Penyusunan analisis evaluasi mutasi, rotasi dan promosi
 - i. Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu Provinsi Riau
 - j. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
 - k. Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Provinsi Riau
 - l. Integrasi Sistem dan Pengelolaan Jaringan Pelayanan Kepegawaian

- m. Pengembangan Sistem Penilaian Kompetensi Provinsi Riau
- n. Pengelolaan Identitas dan Izin Kepegawaian
- o. Pengelolaan kenaikan pangkat dan Penggunaan Gelar ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau
- p. Pengelolaan pensiun PNS
- q. Pengelolaan Satya Lencana Karya Satya
- r. Pengelolaan (LHKPN) pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Riau
- s. Penanganan kasus - kasus kepegawaian dan Bantuan Hukum

5) Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

- a. Penyelenggaraan Penilaian dan Analisis Kesenjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau
- b. Penyusunan Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau
- c. Pemetaan Jabatan, Evaluasi dan Penyusunan Talent Pool ASN Provinsi Riau
- d. Pemberian beasiswa tugas belajar
- e. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM I)
- f. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM II)
- g. Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau
- h. Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau
- i. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas asesor Provinsi Riau
- j. Pelaksanaan magang/praktik kerja
- k. Pelaksanaan Konseling bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- l. Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN
- m. Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi dan berkinerja baik
- n. Pembinaan KORPRI Provinsi Riau

Rencana program dan kegiatan sebagaimana diuraikan di atas sudah sesuai dengan nominatif program dan kegiatan beserta anggaran dan target kinerja sebagaimana terdapat dalam Rancangan Awal RKPD provinsi riau tahun 2022. Hal ini sudah sesuai dengan analisis kebutuhan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada masing-masing kegiatan. Apabila terjadi perubahan yang signifikan pada Rancangan Awal RKPD maka akan berdampak pada tingkat ketercapaian target kinerja program dan kegiatan BKD Provinsi Riau.

Selanjutnya, rumusan rencana Program dan Kegiatan BKD Provinsi Riau Tahun 2022 beserta indikator, target, pagu, serta perkiran maju Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Riau

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.0.03.01.0.0.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik		100%	4.860.422.296	APBD Provinsi Riau		100%	6.924.083.527
3.0.03.01.0.0.00.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Pekanbaru	2.500 Surat	1.000.000			2.500 Surat	15.055.470
3.0.03.01.0.0.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayar		24 Rekening	780.000.000			24 Rekening	1.094.588.937
3.0.03.01.0.0.00.01.003.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		13 Unit	306.018.500			10 Unit	293.778.937
3.0.03.01.0.0.00.01.004.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bulan	400.000.000			12 Bulan	843.778.937
3.0.03.01.0.0.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		14 Unit	146.250.000			14 Unit	263.778.937
3.0.03.01.0.0.00.01.007.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang disediakan		25 Jenis	382.450.664			25 Jenis	229.645.837
3.0.03.01.0.0.00.01.008.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Laporan Yang Dicitak dan Digandakan		25 Jenis	175.180.328			50 Jenis	287.102.987
3.0.03.01.0.0.00.01.009.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		31 Jenis	34.994.804			31 Jenis	164.470.737
3.0.03.01.0.0.00.01.010.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		6.400 Porsi	234.528.000			6.400 Porsi	258.793.937
3.0.03.01.0.0.00.01.011.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah		160 Kali	600.000.000			170 Kali	993.778.937
3.0.03.01.0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa administrasi kantor		2.220 Orang Bulan	1.200.000.000			2.220 Orang Bulan	1.593.778.937
3.0.03.01.0.0.00.01.013.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan		276 Orang Bulan	600.000.000			276 Orang Bulan	885.530.937
3.0.03.01.0.0.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja		100%	154.810.000			100%	968.981.088
3.0.03.01.0.0.00.02.012.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara		2 Ruang	30.000.000			2 Ruang	768.981.088
3.0.03.01.0.0.00.02.016.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		300 Unit	124.810.000			300 Unit	200.000.000
3.0.03.01.0.0.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur		100%	-			100%	290.694.326
3.0.03.01.0.0.00.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		150 Stel	-			180 Stel	155.640.000
3.0.03.01.0.0.00.03.003.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		150 Stel	-			180 Stel	135.054.326
3.0.03.01.3.0.03.15.	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan		100%	2.484.649.504			100%	4.471.201.921
3.0.03.01.3.0.03.15.001.	Penyusunan Dokumen Kebutuhan dan Formasi ASN	Jumlah Dokumen Renstra Pengadaan Kebutuhan ASN Provinsi Riau		1 Dokumen	37.450.855			1 Dokumen	126.166.733

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.0.03.01.3.0.03.15.002.	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah data elektronik ASN yang terkelola secara update		2.500 Data Elektronik	31.432.400			2.500 Data Elektronik	127.686.295
3.0.03.01.3.0.03.15.003.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang direkrut		350 Orang	809.716.353			350 Orang	400.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.004.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah mahasiswa Ikatan Dinas yang difasilitasi		126 Orang	59.825.310			126 Orang	300.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.005.	Pengelolaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang difasilitasi		200 Orang	-			200 Orang	100.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.007.	Penataan PNS dalam Jabatan JPT dan Administrasi	Jumlah dokumen penataan PNS		1 Dokumen	145.912.376			1 Dokumen	307.591.507
3.0.03.01.3.0.03.15.008.	Pengelolaan penataan PNS Pindah Tugas	Jumlah Dokumen Laporan Penataan PNS Pindah Tugas		1 Dokumen	99.835.821			1 Dokumen	160.628.502
3.0.03.01.3.0.03.15.	Penyusunan pola karier ASN Provinsi Riau	Jumlah dokumen pola karier ASN Provinsi Riau yang tersedia						1 Dokumen	100.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.009.	Penyusunan analisis evaluasi mutasi, rotasi dan promosi	Jumlah Dokumen Analisis Evaluasi Mutasi, Rotasi dan Promosi yang disusun		1 Dokumen	15.785.625			1 Dokumen	70.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.010.	Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Evaluasi JFT		2 Dokumen	154.390.466			2 Dokumen	350.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.011.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah Dokumen seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		1 Dokumen	179.293.980			1 Dokumen	200.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.012.	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah modul/fitur/perangkat manajemen kepegawaian yang dikembangkan		1 Sistem/Aplikasi/Modul	245.109.530			1 Sistem/Aplikasi/Modul	200.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.013.	Integrasi Sistem dan Pengelolaan Jaringan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Integrasi Sistem dan Jaringan yang dikelola		1 Modul	36.432.400			1 Modul	139.128.884
3.0.03.01.3.0.03.15.014.	Pengembangan Sistem Penilaian Kompetensi Provinsi Riau	Jumlah modul sistem penilaian kompetensi Provinsi Riau yang dikembangkan		1 Modul	64.853.160			1 Modul	150.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.015.	Pengelolaan Akreditasi UPT Penilaian Kompetensi	Jumlah sertifikat akreditasi UPT Penilaian Kompetensi Provinsi Riau						1 Sertifikasi	150.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.016.	Pengelolaan Identitas dan Izin	Jumlah ASN yang dikelola identitas dan izin		350 Orang	19.588.605			350 Orang	200.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.017.	Pengelolaan kenaikan pangkat dan Penggunaan Gelar ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	Jumlah berkas ASN yang dikelola		4000 Berkas	377.519.434			4000 Berkas	650.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.018.	Pengelolaan pensiun PNS	Jumlah PNS yang difasilitasi		600 Orang	92.925.451			600 Orang	350.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.019.	Pengelolaan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya		1.000 Orang	48.388.000			1000 Orang	120.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.020.	Pengelolaan (LHKPN) pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Riau	Jumlah Dokumen LHKPN Provinsi Riau yang dikelola		359 Dokumen	-			359 Dokumen	120.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.021.	Penanganan kasus - kasus kepegawaian dan Bantuan Hukum	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani		50 Kasus	66.189.738			70 Kasus	150.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Presentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang terlaksanakan		100%	5.791.528.900			100%	6.804.026.676
3.0.03.01.3.0.03.17.001.	Penyelenggaraan Penilaian dan Analisis Kesenjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Jumlah dokumen		2 Dokumen	34.399.123			2 Dokumen	70.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.0.03.01.3.0.03.17.002.	Penyusunan Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau	Jumlah dokumen standar kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan		1 Dokumen	48.616.000			1 Dokumen	100.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.003.	Pemetaan Jabatan, Evaluasi dan Penyusunan Talent Pool ASN Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pemetaan, Evaluasi dan Talent Pool		2 Dokumen	178.153.705			2 Dokumen	150.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.004.	Penyusunan Strategi Peningkatan Kompetensi	Jumlah dokumen strategi program dan kegiatan Peningkatan Kompetensi		-	-			1 Dokumen	100.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.005.	Pemberian beasiswa tugas belajar	Jumlah PNS yang Terfasilitasi Mengikuti Tugas Belajar		78 Orang	2.633.478.701			78 Orang	4.320.913.296
3.0.03.01.3.0.03.17.006.	Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk I		1 Orang	159.363.176			1 Orang	81.483.600
3.0.03.01.3.0.03.17.007.	Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II		6 Orang	749.636.205			6 Orang	250.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.008.	Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Diklat Fungsional		40 Orang	822.664.712			40 Orang	250.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.009.	Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis		45 Orang	715.708.884			45 Orang	250.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.011.	Penyelenggaraan peningkatan kapasitas asesor Provinsi Riau	Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assessor		20 Orang	55.782.175			20 Orang	246.808.000
3.0.03.01.3.0.03.17.012.	Pelaksanaan magang/praktik kerja	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti magang dan prktik kerja		10 Orang	24.517.497			20 Orang	257.686.680
3.0.03.01.3.0.03.17.013.	Pelaksanaan Konseling bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah ASN yang dikonseling		80 Orang	33.011.679			80 Orang	120.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.014.	Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN		12 Kali	179.787.412			12 Kali	107.135.100
3.0.03.01.3.0.03.17.016.	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi dan berkinerja baik	Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan		22 Orang	33.795.806			22 Orang	400.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.017.	Pembinaan KORPRI Provinsi Riau	Jumlah Agenda Pembinaan KORPRI		5 Agenda	122.613.825			5 Agenda	100.000.000
JUMLAH					13.291.410.700				19.458.987.539

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang bersifat teknis operasional, Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan dokumen pembangunan daerah Provinsi Riau yang tidak terlepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan prosedur dan tahapan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, serta arahan dari Gubernur Riau sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 52/SE/2021 Tanggal 18 Maret 2021 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, maka rumusan rencana kerja dan pendanaan yang terdiri atas program, kegiatan, indikator dan target capaian serta pagu indikatif Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 dan perkiraan maju Tahun 2023 dirumuskan dalam format TC. 33 tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana dan Pendanaan Perangkat Daerah
Tahun 2021

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.0.03.01.0.0.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik		100%	4.860.422.296	APBD Provinsi Riau		100%	6.924.083.527
3.0.03.01.0.0.00.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Pekanbaru	2.500 Surat	1.000.000			2.500 Surat	15.055.470
3.0.03.01.0.0.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayar		24 Rekening	780.000.000			24 Rekening	1.094.588.937
3.0.03.01.0.0.00.01.003.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		13 Unit	306.018.500			10 Unit	293.778.937
3.0.03.01.0.0.00.01.004.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bulan	400.000.000			12 Bulan	843.778.937
3.0.03.01.0.0.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		14 Unit	146.250.000			14 Unit	263.778.937
3.0.03.01.0.0.00.01.007.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang disediakan		25 Jenis	382.450.664			25 Jenis	229.645.837
3.0.03.01.0.0.00.01.008.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Laporan Yang Dicitak dan Digandakan		25 Jenis	175.180.328			50 Jenis	287.102.987
3.0.03.01.0.0.00.01.009.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		31 Jenis	34.994.804			31 Jenis	164.470.737
3.0.03.01.0.0.00.01.010.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		6.400 Porsi	234.528.000			6.400 Porsi	258.793.937
3.0.03.01.0.0.00.01.011.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah		160 Kali	600.000.000			170 Kali	993.778.937
3.0.03.01.0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa administrasi kantor		2.220 Orang Bulan	1.200.000.000			2.220 Orang Bulan	1.593.778.937
3.0.03.01.0.0.00.01.013.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan		276 Orang Bulan	600.000.000			276 Orang Bulan	885.530.937
3.0.03.01.0.0.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja		100%	154.810.000			100%	968.981.088
3.0.03.01.0.0.00.02.012.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara		2 Ruang	30.000.000			2 Ruang	768.981.088
3.0.03.01.0.0.00.02.016.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		300 Unit	124.810.000			300 Unit	200.000.000
3.0.03.01.0.0.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur		100%	-			100%	290.694.326
3.0.03.01.0.0.00.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		150 Stel	-			180 Stel	155.640.000
3.0.03.01.0.0.00.03.003.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		150 Stel	-			180 Stel	135.054.326

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.0.03.01.3.0.03.15.	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan		100%	2.484.649.504			100%	4.471.201.921
3.0.03.01.3.0.03.15.001.	Penyusunan Dokumen Kebutuhan dan Formasi ASN	Jumlah Dokumen Renstra Pengadaan Kebutuhan ASN Provinsi Riau		1 Dokumen	37.450.855			1 Dokumen	126.166.733
3.0.03.01.3.0.03.15.002.	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah data elektronik ASN yang dikelola secara update		2.500 Data Elektronik	31.432.400			2.500 Data Elektronik	127.686.295
3.0.03.01.3.0.03.15.003.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang direkrut		350 Orang	809.716.353			350 Orang	400.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.004.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah mahasiswa Ikatan Dinas yang difasilitasi		126 Orang	59.825.310			126 Orang	300.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.005.	Pengelolaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang difasilitasi		200 Orang	-			200 Orang	100.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.007.	Penataan PNS dalam Jabatan JPT dan Administrasi	Jumlah dokumen penataan PNS		1 Dokumen	145.912.376			1 Dokumen	307.591.507
3.0.03.01.3.0.03.15.008.	Pengelolaan penataan PNS Pindah Tugas	Jumlah Dokumen Laporan Penataan PNS Pindah Tugas		1 Dokumen	99.835.821			1 Dokumen	160.628.502
3.0.03.01.3.0.03.15.	Penyusunan pola karier ASN Provinsi Riau	Jumlah dokumen pola karier ASN Provinsi Riau yang tersedia						1 Dokumen	100.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.009.	Penyusunan analisis evaluasi mutasi, rotasi dan promosi	Jumlah Dokumen Analisis Evaluasi Mutasi, Rotasi dan Promosi yang		1 Dokumen	15.785.625			1 Dokumen	70.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.010.	Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Evaluasi JFT		2 Dokumen	154.390.466			2 Dokumen	350.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.011.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah Dokumen seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		1 Dokumen	179.293.980			1 Dokumen	200.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.012.	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah modul/fitur/perangkat manajemen kepegawaian yang		1 Sistem/Aplikasi/	245.109.530			1 Sistem/Aplikasi/	200.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.013.	Integrasi Sistem dan Pengelolaan Jaringan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Integrasi Sistem dan Jaringan yang dikelola		1 Modul	36.432.400			1 Modul	139.128.884
3.0.03.01.3.0.03.15.014.	Pengembangan Sistem Penilaian Kompetensi Provinsi Riau	Jumlah modul sistem penilaian kompetensi Provinsi Riau yang		1 Modul	64.853.160			1 Modul	150.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.015.	Pengelolaan Akreditasi UPT Penilaian Kompetensi	Jumlah sertifikat akreditasi UPT Penilaian Kompetensi Provinsi Riau						1 Sertifikasi	150.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.016.	Pengelolaan Identitas dan Izin	Jumlah ASN yang dikelola identitas		350 Orang	19.588.605			350 Orang	200.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.017.	Pengelolaan kenaikan pangkat dan Penggunaan Gelar ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	Jumlah berkas ASN yang dikelola		4000 Berkas	377.519.434			4000 Berkas	650.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.018.	Pengelolaan pensiun PNS	Jumlah PNS yang difasilitasi		600 Orang	92.925.451			600 Orang	350.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.019.	Pengelolaan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima Penghargaan Satya Lencana Karya		1.000 Orang	48.388.000			1000 Orang	120.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.020.	Pengelolaan (LHKPN) pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Riau	Jumlah Dokumen LHKPN Provinsi Riau yang dikelola		359 Dokumen	-			359 Dokumen	120.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.0.03.01.3.0.03.15.021.	Penanganan kasus - kasus kepegawaian dan Bantuan Hukum	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani		50 Kasus	66.189.738			70 Kasus	150.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Presentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang terlaksanakan		100%	5.791.528.900			100%	6.804.026.676
3.0.03.01.3.0.03.17.001.	Penyelenggaraan Penilaian dan Analisis Kesenjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Jumlah dokumen		2 Dokumen	34.399.123			2 Dokumen	70.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.002.	Penyusunan Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau	Jumlah dokumen standar kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan		1 Dokumen	48.616.000			1 Dokumen	100.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.003.	Pemetaan Jabatan, Evaluasi dan Penyusunan Talent Pool ASN Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pemetaan, Evaluasi dan Talent Pool		2 Dokumen	178.153.705			2 Dokumen	150.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.004.	Penyusunan Strategi Peningkatan Kompetensi	Jumlah dokumen strategi program dan kegiatan Peningkatan Kompetensi		-	-			1 Dokumen	100.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.005.	Pemberian beasiswa tugas belajar	Jumlah PNS yang Terfasilitasi Mengikuti Tugas Belajar		78 Orang	2.633.478.701			78 Orang	4.320.913.296
3.0.03.01.3.0.03.17.006.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan		1 Orang	159.363.176			1 Orang	81.483.600
3.0.03.01.3.0.03.17.007.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II		6 Orang	749.636.205			6 Orang	250.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.008.	Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Diklat Fungsional		40 Orang	822.664.712			40 Orang	250.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.009.	Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		45 Orang	715.708.884			45 Orang	250.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.011.	Penyelenggaraan peningkatan kapasitas asesor Provinsi Riau	Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assessor		20 Orang	55.782.175			20 Orang	246.808.000
3.0.03.01.3.0.03.17.012.	Pelaksanaan magang/praktik kerja	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti magang dan prktik kerja		10 Orang	24.517.497			20 Orang	257.686.680
3.0.03.01.3.0.03.17.013.	Pelaksanaan Konseling bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah ASN yang dikonseling		80 Orang	33.011.679			80 Orang	120.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.014.	Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN		12 Kali	179.787.412			12 Kali	107.135.100
3.0.03.01.3.0.03.17.016.	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi dan berkinerja baik	Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima		22 Orang	33.795.806			22 Orang	400.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.017.	Pembinaan KORPRI Provinsi Riau	Jumlah Agenda Pembinaan KORPRI		5 Agenda	122.613.825			5 Agenda	100.000.000
JUMLAH					13.291.410.700				19.458.987.539

BAB V PENUTUP

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 ini disusun dengan berkoordinasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau.

Dengan disusunnya dokumen renja ini diharapkan agar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada Tahun 2022 dapat berjalan secara lebih terarah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Riau serta tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 dan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2019 – 2024.

Demikianlah Renja Badan Kepegawaian daerah Provinsi Riau Tahun 2022 disusun sebagai acuan dalam merumuskan program dan kegiatan Tahun 2022.

Pekanbaru, Agustus 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650904 199703 1 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Cut Nyak Dien Telp. (0761) 21172 - 848593 - 33073 Fax (0761) (0761) 21172 - 848593 - 33073
E-mail : bkd@riau.go.id Website : <http://bkd.riau.go.id>
PEKANBARU - RIAU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR Kpts.900/BKD/1.1/1/2021/89

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Tim Penyusun Renja Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Tim Penyusun Renja Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022, sebagaimana terdapat pada lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022, sebagaimana terdapat pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Penyusun Renja Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi;
 2. Melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku;
 3. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 20 Januari 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19650904 199703 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Nomor : Kpts.900/BKD/1.1/I/2021/49
Tanggal : 29 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2022**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala BKD Provinsi Riau	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris BKD Provinsi Riau	Ketua
3.	Kasubbag. Perencanaan Program	Sekretaris
4.	Fungsional Perencana Muda	Anggota
5.	Fungsional Perencana Pertama	Anggota
6.	Ira Diana Sari, SE	Anggota
7.	Satria Nugraha, S.STP	Anggota
8.	Fanny Ramadhani, S.STP	Anggota
9.	Prima Putra	Anggota
10.	Rulianto	Operator
11.	Belly Aprika	Operator

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 29 Januari 2021
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19650904 199703 1 001

Lampiran II: Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Nomor : Kpts.900/BKD/1.1/1/2021/89
Tanggal : 19 Januari 2021

**AGENDA KERJA TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2022**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Penyusunan Rancangan Awal Renja	Januari 2021
2.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Februari 2021
3.	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja	Februari 2021
4.	Penyusunan Rancangan Renja	Maret 2021
5.	Penyusunan Rancangan Akhir Renja	Mei 2021
6.	Penetapan Renja Perangkat Daerah	Juni 2021

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 20 Januari 2021
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19650904 199703 1 001

**FORM VERIFIKASI DOKUMEN
RENJA PD TAHUN 2022**

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
1	COVER	JUDUL COVER : "RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2022 DINAS/BADAN..... (sesuai Perangkat daerah masing-masing)	V		
2	PERGUB PENETAPAN	Menunggu Peraturan Gubernur Riau tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Riau Tahun 2022	V		
3	DAFTAR ISI	Sesuai dengan Isi Renja Perangkat Daerah	V		
4	DAFTAR TABEL	Judul Tabel dan Halaman Tabel	V		
5	BAB I PENDAHULUAN				
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	V		
	1.2. Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.		V	Mohon ditambahkan 15). pergub rancangan akhir 16).Pergub renja tahun 2022 Berserta lampiran 17).Pergub RKPD tahun 2020 18).SK Tim Renja
	1.3. Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah	V		
	1.4. Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	V		
6	BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020				
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD	2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	V		
		2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	V		
		2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	V		
		2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;	V		

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
		2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut Menggunakan Tabel T-C.29			
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK Menggunakan Tabel T-C.30	V		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.	V		
	2.4. Review terhadap RKPD	Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan baru yang tidak terdapat pada RKPD, atau program dan kegiatan/sub kegiatan cocok namun besarnya berbeda; Menggunakan Tabel T-C.31	V		
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh. Misalnya melalui Forum SKPD atau kegiatan lainnya; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; Menggunakan Tabel T-C.32	V		
7	BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH				
	3.1. Telaahan terhadap	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan	V		

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
	Kebijakan Nasional	nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah			
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	V		
	3.3. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/sub kegiatan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Menggunakan Tabel T-C.33		V	Mohon di cek kembali program dan kegiatan yang dilakukan perubahan dari rancangan ke rancangan final terkait tugas belajar
8	BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH				
		Diambil dari SIPD Menu Laporan ==> Renja ==> Penetapan - Penetapan RKPD 2022.	V		
9	BAB V PENUTUP	1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 3. Rencana tindak lanjut. 4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah , serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.	V V V V		
10	LAMPIRAN	1. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 2. Hasil Verifikasi Dokumen Renja PD pada tahapan sebelumnya. 3. Hasil Pemetaan program dan kegiatan ke Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah		V	disesuaikan

Perangkat Daerah
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU
SEKRETARIS



T, FAISAL, SE
NIP. 19700525 199703 1 004

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM



HARRY PRABOWO, S.STP
NIP. 19860308 200412 1 001

FUNGSIONAL PERENCANA MUDA



MUSTIKA RIZA, S.STP, M.Si
NIP. 19830809 200112 2 002

Pekanbaru, Juli 2021

Verifikator :
BAPPEDALITBANG PROVINSI RIAU
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA



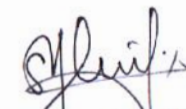
HERIYANTO, S.Hut, MT
NIP. 19711126 199803 1 006

KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN TRANSMIGRASI



ARI DIANUARI
NIP. 19810103 200902 1 002

FUNGSIONAL PERENCANA MADYA



DESNIRIZA, SH, M.Si
NIP. 19721209 199803 2 003

HASIL PEMETAAN

PROGRAM/KEGIATAN PADA RKPD/RENJA PD TAHUN 2022 TERHADAP PEMUTAKHIRAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

OPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2022					PEMUTAKHIRAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)					
Kode	Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)	Kode	Urusan/ Program/Kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub - Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
3.0.03.01.0.0.00.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	4.860.030.296	5.03	URUSAN				
					5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.014.840.296
					5.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	1.732.780.296
3.0.03.01.0.0.00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	31 Jenis	34.994.804	5.03.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	31 Jenis	34.994.804
3.0.03.01.0.0.00.01.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13 Unit	306.018.500	5.03.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	688.469.164
3.0.03.01.0.0.00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	25 Jenis	382.450.664				Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	25 Jenis	
3.0.03.01.0.0.00.01.010.	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	6400 Porsi	234.528.000	5.03.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	6400 Porsi	234.528.000
3.0.03.01.0.0.00.01.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	25 Jenis	175.180.328	5.03.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	25 Jenis	175.180.328
3.0.03.01.0.0.00.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	160 Kali	599.608.000	5.03.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	160 Kali	599.608.000
					5.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.981.000.000
3.0.03.01.0.0.00.01.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	2500 Surat	1.000.000	5.03.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	2500 Surat	1.000.000
3.0.03.01.0.0.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	24 Rekening	780.000.000	5.03.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	24 Rekening	780.000.000
3.0.03.01.0.0.00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	400.000.000	5.03.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	2.200.000.000
3.0.03.01.0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	2220 OB	1.200.000.000				Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	2220 OB	
3.0.03.01.0.0.00.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	276 OB	600.000.000				Jumlah tenaga satpam yang disediakan	276 OB	

PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2022					PEMUTAKHIRAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)					
Kode	Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)	Kode	Urusan/ Program/Kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub - Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
					5.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	316 Unit	301.060.000
3.0.03.01.0.0.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 Unit	146.250.000	5.03.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 unit	146.250.000
3.0.03.01.0.0.00.01.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100 Persen	154.810.000						
3.0.03.01.0.0.00.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	300 Unit	124.810.000	5.03.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	300 Unit	124.810.000
3.0.03.01.0.0.00.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	2 Ruang	30.000.000	5.03.01.1.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	2 Ruang	30.000.000
3.0.03.01.0.0.00.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Tingkat Kehadiran ASN	100 Persen	-						
3.0.03.01.0.0.00.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	150 Stel	-			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	150 Stel	
3.0.03.01.0.0.00.03.003.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	150 Stel	-			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	150 Stel	
3.0.03.01.3.0.03.15.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Pelayanan ASN yang Terselesaikan	100 Persen		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				8.276.178.404
					5.03.02.1.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		persentase pengadaan, pemberhentian dan pembinaan kepegawaian yang terselesaikan persentase data dan informasi asn yang dikelola dalam sistem kepegawaian	100%	1.395.269.419
3.0.03.01.3.0.03.15.001.	Penyusunan Dokumen Kebutuhan dan Formasi ASN	Jumlah dokumen	1 Dokumen	37.450.855	5.03.02.1.01.02		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen rencana kebutuhan/formasi ASN	1 Dokumen	37.450.855
3.0.03.01.3.0.03.15.003.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang direkrut	350 Orang	809.716.353	5.03.02.1.01.04		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang direkrut	350 Orang	809.716.353
3.0.03.01.3.0.03.15.018.	Pengelolaan Pensiun PNS	Jumlah PNS yang difasilitasi	600 Orang	92.925.451	5.03.02.1.01.06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang difasilitasi	600 Orang	92.925.451
3.0.03.01.3.0.03.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase pembinaan dan pengembangan apratur	100 Persen							
3.0.03.01.3.0.03.17.017.	Pembinaan KORPRI Provinsi Riau	Jumlah agenda pembinaan KORPRI	5 Agenda	122.613.825	5.03.02.1.01.08		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah agenda pembinaan KORPRI	5 Agenda	122.613.825
3.0.03.01.3.0.03.15.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Pelayanan ASN yang Terselesaikan	100 Persen							

[illegible]

PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2022					PEMUTAKHIRAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)					
Kode	Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)	Kode	Urusan/ Program/Kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub - Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
3.0.03.01.3.0.03.17.011.	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau	Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assesor	20 Orang	55.782.175				Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assesor	20 Orang	
3.0.03.01.3.0.03.17.004.	Penyusunan Strategi Peningkatan Kompetensi	Jumlah dokumen strategi program dan kegiatan peningkatan kompetensi	-	-	5.03.02.1.03.03		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah dokumen rencana pengembangan kompetensi ASN melalui admistrasi diklat dan sertifikasi	-	-
3.0.03.01.3.0.03.17.005.	Pemberian Beasiswa Tugas Belajar	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti tugas belajar	24 Orang	2.633.478.701	5.03.02.1.03.04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti tugas belajar	78 Orang	2.633.478.701
3.0.03.01.3.0.03.15.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Pelayanan ASN yang Terselesaikan	100 Persen							
3.0.03.01.3.0.03.15.005.	Pengelolaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang difasilitasi	200 Orang	0				Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	200 Orang	
3.0.03.01.3.0.03.15.004.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah mahasiswa ikatan dinas yang difasilitasi	126 Orang	59.825.310	5.03.02.1.03.05		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah mahasiswa ikatan dinas yang difasilitasi	126 Orang	800.051.691
3.0.03.01.3.0.03.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase pembinaan dan pengembangan apratur	100 Persen							
3.0.03.01.3.0.03.17.012.	Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti magang dan praktik kerja	2 Orang	24.517.497				Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti magang dan praktik kerja	2 Orang	
3.0.03.01.3.0.03.17.009.	Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	45 Orang	715.708.884				Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	45 Orang	
3.0.03.01.3.0.03.17.006.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional Tk I	1 Orang	159.363.176	5.03.02.1.03.06		Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk I	1 Orang	908.999.381
3.0.03.01.3.0.03.17.007.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional Tk II	6 Orang	749.636.205				Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II	6 Orang	
3.0.03.01.3.0.03.17.010.	Seleksi Diklat Kepemimpinan (PIM 2,3,4)	Jumlah PNS yang terseleksi mengikuti diklat PIM Tk II, III, IV	-	0				Jumlah PNS yang terseleksi mengikuti Diklat PIM Tk II, III, IV	-	
3.0.03.01.3.0.03.17.008.	Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti diklat fungsional	40 Orang	822.664.712	5.03.02.1.03.10		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti diklat fungsional	40 Orang	822.664.712
3.0.03.01.3.0.03.15.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Pelayanan ASN yang Terselesaikan	100 Persen							
3.0.03.01.3.0.03.15.010.	Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu Provinsi Riau	Jumlah dokumen pengelolaan dan evaluasi JFT	2 Dokumen	154.390.466	5.03.02.1.03.14		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Evaluasi JFT	2 Dokumen	154.390.466
					5.03.02.1.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang terselesaikan	100%	395.571.758
3.0.03.01.3.0.03.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase pembinaan dan pengembangan apratur	100 Persen							
3.0.03.01.3.0.03.17.001.	Penyelenggaraan Penilaian dan Analisis Kesenjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Jumlah dokumen	2 Dokumen	34.399.123	5.03.02.1.04.02		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	2 Dokumen	34.399.123

PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2022					PEMUTAKHIRAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)					
Kode	Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)	Kode	Urusan/ Program/Kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub - Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
3.0.03.01.3.0.03.17.016.	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi dan Berkinerja Baik	Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan	22 Orang	33.795.806	5.03.02.1.04.04		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan	22 Orang	33.795.806
3.0.03.01.3.0.03.15.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen							
3.0.03.01.3.0.03.15.019.	Pengelolaan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya	1000 Orang	48.388.000	5.03.02.1.04.05		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya	1000 Orang	48.388.000
3.0.03.01.3.0.03.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase pembinaan dan pengembangan apratur	100 Persen							
3.0.03.01.3.0.03.17.013.	Pelaksanaan Konseling bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah ASN yang dikonseling	80 Orang	33.011.679	5.03.02.1.04.07		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang memperoleh pembinaan konseling	80 Orang	212.799.091
3.0.03.01.3.0.03.17.014.	Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN	12 Kali	179.787.412				Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN	12 Kali	
3.0.03.01.3.0.03.15.020.	Pengelolaan (LHKPN) pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Riau	Jumlah Dokumen LHKPN Provinsi Riau yang dikelola	359 Dokumen	0				Jumlah Dokumen LHKPN Provinsi Riau yang dikelola	359 Dokumen	
3.0.03.01.3.0.03.15.021.	Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian dan Bantuan Hukum	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	50 Kasus	66.189.738	5.03.02.1.04.08		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	70 Kasus	66.189.738
Jumlah				13.291.018.700	Jumlah 13.291.018.700					